

DEMOKRASI TANPA DEMOS

Refleksi 100 Ilmuwan
Sosial Politik Tentang
Kemunduran Demokrasi
di Indonesia

Editor:
Wijayanto, Aisah Putri Budiatri
Herlambang P Wiratraman



LP3ES

Demokrasi Tanpa *Demos*

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Wijayanto • Aisah Putri Budiatri • Herlambang P Wiratraman

Demokrasi Tanpa *Demos*

**Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik
Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia**

LP3ES

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan pertama, Agustus 2021

Penerbit LP3ES, anggota Ikapi

Jl. Pangkalan Jati No. 71

Cinere, Depok - 16513

Telp. 021-2765 4119. E-mail: lp3es@lp3es.or.id

Hak cipta © 2021, pada penulis

Asisten Editor: Gita Nindya Elsitra, Lya Anggraini

Penerjemah: Aisah Putri Budiatri, Lya Anggraini, dan Gita Nindya Elsitra

Disunting oleh: Malik Ruslan

Desain sampul: Alanbosa

Daftar Isi

Kata Sambutan <i>Didik J Rachbini</i>	xiii
Pengantar Editor Demokrasi Tanpa <i>Demos</i>: Sebuah Pengantar <i>Wijayanto, Aisah Putri Budiatri dan</i> <i>Herlambang P. Wiratraman</i>	xvi
BAGIAN 1: AGAMA, NEGARA DAN DEMOKRASI	1
• Demokrasi, Agama, dan Negara di Indonesia Pasca Soeharto <i>Bowo Sugiarto</i>	3
• Penodaan Agama dan Ketertiban Umum di Indonesia Kontemporer <i>Daniel Peterson</i>	15
• Islamisme dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Problema dan Tantangan ke Depan <i>Luthfi Makhasin</i>	31
• Politik Penyertaan dalam Islam dan Demokrasi di Indonesia <i>Yanwar Pribadi</i>	42
• Perpecahan Politik Islam dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia <i>Diego Fossati</i>	54

• Revitalisasi Etika Demokrasi di Indonesia Melalui Pendekatan Tasawuf <i>Asep Usman Ismail</i>	63
• Islam, Demokrasi dan Penciptaan Identitas Mayoritas Muslim di Indonesia pada Abad ke-21 <i>Chris Chaplin</i>	78
BAGIAN 2: PARTAI POLITIK, PEMILU DAN DEMOKRASI	91
• Sistem Elektoral Indonesia: Mengapa Perlu Direformasi? <i>Marcus Mietzner</i>	93
• Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia <i>Djayadi Hanan</i>	107
• Di Balik Citra Demokrasi: Coretan Ilmuwan Pada Wajah Politik Uang <i>George Towar Ikbal Tawakkal</i>	119
• Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi <i>Firman Noor</i>	132
• Presidensialisme, Populisme dan Disfungsi Partai Politik <i>Andreas Ufen</i>	147
• Konflik Internal Partai dan Intervensi Negara di Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri</i>	157
• Vote Minus Voice: Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi <i>Syarif Hidayat</i>	173
BAGIAN 3: MEDIA, INTERNET, DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI	187
• Jakarta Bukan Indonesia: Catatan Merah Demokrasi Penyiaran <i>Lintang Ratri Rahmiaji</i>	189

• Beragam Tantangan Media Penyiaran Memenuhi Kepentingan Publik, Lokal, dan Komunitas <i>Eni Maryani</i>	211
• Independensi Media dan Kuasa Uang di Indonesia <i>Masduki</i>	223
• E-demokrasi: Problem Menjinakkan Digital Leviathan <i>Kuskridho Ambardi</i>	234
• Media Sosial, Disrupsi Politik, dan Ruang Publik Digital <i>Ni Made Ras Amanda G</i>	248
• Lipset dan E-Demokrasi <i>Harry Seldadyo</i>	259
• Banyak Klik Tapi Sedikit Pemantik: Aktivisme Sosial Media di Indonesia <i>Merlyna Lim</i>	272
BAGIAN 4: KORUPSI DAN PENANGGULANGANNYA	289
• Koreksi Total Kinerja Demokrasi dan Antikorupsi <i>Ahmad Khoirul Umam</i>	291
• Melacak Basis Etika Antikorupsi di Indonesia: Menyandingkan Gus Dur dengan Pangeran Diponegoro <i>Ahmad Suaedy</i>	303
• Regulatory Capitalism dan Tantangan Pemberantasan Korupsi pada Rantai Pasokan Sektor Hulu Minyak dan Gas di Indonesia <i>Michael Buehler</i>	318
• Korupsi dan Demokra[tisa]si: Ada Apa dengan Indonesia? <i>Malik Ruslan</i>	334
• Praktik Suap di Indonesia: Survei Korupsi di Sektor Bisnis <i>Paul Kenny dan Eve Warburton</i>	346

BAGIAN 5: GENDER, LEMBAGA DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI	363
• Gender dan Demokratisasi Indonesia: Konsep dan Kontribusi Perempuan <i>Kurniawati Hastuti Dewi</i>	365
• Politik Sarung dan Susu: Perempuan dan Demokrasi Perempuan Indonesia di Era Orde Baru, Reformasi dan Era MOOI (Militerisme, Otoritarianisme, Oligarki dan Islamofasisme) <i>Julia Suryakusuma</i>	379
• Deviasi Legislasi Gender <i>Muhammad Ihsan Kabullah</i>	397
• Demokrasi dan Jalan Terjal Kepemimpinan Jurnalis Perempuan <i>Nurul Hasfi, Sunarto dan Amida Yusriana</i>	404
BAGIAN 6: POLITIK LOKAL	413
• Dalam Cengkraman Elite: Kenduri di Tingkat Lokal <i>Wahyu Prasetyawan</i>	415
• Gejala Kemerostan Demokrasi di Bali: Potensi Intervensi Negara Terhadap Kemandirian Desa Adat <i>Kadek Dwita Apriani</i>	426
• Menata Pluralisme Hukum di Indonesia: Pelajaran dari Aceh <i>Arfiansyah</i>	435
• Demokrasi dalam Pranata Adat Suku-suku Matrilineal di Riau <i>Isnati Kuswini</i>	452
BAGIAN 7: KONFLIK, KEKERASAN DAN KEAMANAN	471
• Demokrasi dan Masa Depan Konflik di Indonesia <i>Cahyo Pamungkas</i>	473

• Dampak Pembangunan Bagi Mama-mama Papua: Memahami Akar Masalah dan Mencari Solusi <i>Lya Anggraini</i>	488
• De-eskalasi Kekerasan dan Faktor Ekonomi Politik dari Penyebar Perdamaian: Bukti dari Maluku, Indonesia <i>Alexandre Pelletier dan Jessica Soedirgo</i>	502
• Kekerasan dan Partisipasi Politik di Indonesia <i>Masaaki Okamoto</i>	514
• Problem Pengawasan Sektor Keamanan dan Kemunduran Demokrasi <i>Muhamad Haripin</i>	525
BAGIAN 8: KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI	535
• Kemunduran Demokrasi dan Bencana di Indonesia: Suatu Kajian Awal <i>Yogi Setya Permana</i>	537
• Regresi Demokrasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia <i>Dirk Tomsa</i>	547
• Manifesto: Menuju Peradaban Ekologis Untuk Indonesia <i>Gerry van Klinken</i>	557
BAGIAN 9: POPULISME DAN POLITIK IDENTITAS	569
• Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah? <i>Aris Arif Mundayat</i>	571
• Demokrasi dan Populisme Islam <i>Azyumardi Azra</i>	589
• Mempertimbangkan Kewarganegaraan yang Majemuk untuk Indonesia yang Multikultural <i>R. Yando Zakaria</i>	602

• Keluar dari Defisit Demokrasi: Persoalan Budaya dan Jati Diri <i>Zacky Khairul Umam</i>	619
• Penundaan Abstraksi Demokrasi dan Demokrasi Keindonesiaan <i>Musa Maliki</i>	627
• Merajut Kebinekaan Kita sebagai Negara-Bangsa: Refleksi 75 Tahun Indonesia <i>Saiful Mujani</i>	641
BAGIAN 10: POLITIK KEWARGAAN	653
• Covid-19 dan Kebingungan Masyarakat: Cermin Demokrasi Semu di Indonesia <i>Citra Indah Lestari dan Lintang Ratri Rahmiaji</i>	655
• Ancaman <i>Constitutional Retrogression</i> dan Membaca Peluang <i>Constitutional Complaints</i>: Konsolidasi Demokrasi lewat Negara Hukum <i>Mirza Satria Buana</i>	668
• Mandeknya Keadilan Transisi dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia <i>Sri Lestari Wahyuningroem</i>	681
• Merosotnya Ruang Publik untuk Kritik dan Protes <i>Usman Hamid</i>	699
• Penjinakan Intelektual dan Serangan Terhadap Kebebasan Akademik <i>Herlambang P Wiratraman</i>	714
• Warga Tanpa Hak: Mengapa Perampasan Tanah Mudah Dilakukan di Indonesia <i>Ward Berenschot dan Ahmad Dhiaulhaq</i>	731
BAGIAN 11: PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI	747
• Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi <i>Faisal Basri</i>	749

• Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi <i>Siwage Dharma Negara</i>	764
• Demokrasi, <i>Good Governance</i> dan Kesejahteraan <i>Budi Setiyono</i>	781
• Demokrasi dan Pembangunan Manusia <i>Emil Salim</i>	793
• Merancang Demokrasi Indonesia <i>a la</i> SBY dan Jokowi <i>Arif Budi Pratama</i>	802
• Pangan dalam Pusaran Politik <i>Toto Subandriyo</i>	813
• Evolusi Oligarki di Indonesia <i>Henky Wijaya</i>	822
• Apa Kemungkinannya Bagi Gerakan Sosial di Masa Aliansi Elite Nasional-Liberal (di Indonesia)? <i>Gabriel Facal, Gloria Truly Estrelita dan Sarah Anais Andrieu</i>	831
BAGIAN 12: MENIMBANG DEMOKRASI	845
• Demokrasi Parsial di Indonesia <i>Jeffrey A Winters</i>	847
• Peran Reformasi Administrasi Publik Untuk Memperkuat Kebermanfaatan Demokrasi di Indonesia <i>Eko Prasajo</i>	858
• Tantangan Demokrasi Indonesia dan Jalan Keluarnya <i>Iqra Anugrah</i>	874
• Demokrasi dan Kebenaran <i>Otto Gusti Madung</i>	887
• Tantangan Konseptual dan Model Demokrasi <i>Meuthia Ganie-Rochman</i>	901

• Demokrasi <i>a la</i> Indonesia?: Demokrasi <i>Deliberatif</i> dalam Praktik Politik, Sosial dan Ekonomi	911
<i>Didin S Damanhuri</i>	
• Hilangnya Kiri Baru di Indonesia	921
<i>Olle Törnquist</i>	
Apresiasi	937
Indeks	940
<i>Tentang Editor</i>	00

Kata Sambutan

Didik J Rachbini

Kinerja LP3ES pada tahun 2010-an tidak sama dengan kinerja pada tahun 1980-an. Ketika didirikan tahun 1971, semangat pengembangan “*civil society*” meningkat. Karena peranan negara ketika itu sangat besar, maka peranan LP3ES juga begitu besar—karena yang dihadapinya adalah “*magnitude*” yang besar. Dari dinamika gerakan intelektualitas dan *civil society* tersebut, lahir banyak pemikir dari LP3ES. Sebutlah beberapa di antaranya: Nono Anwar Makarim, Tawang Alun, Dawam Rahardjo, Ismid Hadad, Fachry Ali, Ignas Kleden, Vedi R Hadiz dan lain-lain.

Tetapi selama 1-2 dekade terakhir, sejalan dengan perkembangan demokrasi di era Reformasi, peranan LP3ES menurun. LP3ES seolah tidak lagi mempunyai “*sparring partner*”, sebuah kondisi yang berbeda dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Tetapi sebetulnya bukan hanya LP3ES yang mengalami persoalan itu. Lembaga-lembaga non-Pemerintah yang lain sebetulnya juga menghadapi masalah yang sama. Dari dalam LP3ES sendiri, bahkan pernah muncul pendapat yang menyatakan bahwa LP3ES memang seharusnya berhenti atau mati setelah Reformasi, terutama setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru.

Namun demikian, dua dekade setelah Reformasi, terlihat ada arus balik. Arus balik ini merupakan respons atas munculnya upaya secara terang-terangan untuk memungungi demokrasi. Secara lebih konket, ada kecenderungan menguatnya sikap dan praktik

otoritarian yang dilakukan oleh negara. Kondisi ini kemudian melahirkan gelombang kritik dari pelbagai kalangan termasuk LP3ES terhadap praktik dan sikap antidemokrasi tersebut. Sangat disayangkan, karena pelaku dan pejuang demokrasi itu sendirilah yang menjadi pelaku utamanya ketika mereka menjalankan peran baru sebagai aktor di dalam negara.

Suasana pun berbalik ke era tahun 1980-an dan tahun 1990-an di mana peran negara semakin kuat. Instrumen “*check and balance*” sebagai bagian utama dan penting dari sistem demokrasi tidak bekerja karena partai dan parlemen tumpul. Keadaan ini merupakan tantangan bagi aktor di dalam *civil society* untuk mengisi “ruang kosong” karena ditinggalkan oleh parlemen, partai dan aktor-aktor di dalam sistem demokrasi formal.

Dalam 2-3 tahun terakhir ini, LP3ES berupaya mengisi ruang kosong dimaksud melalui peran kritis, terutama dilakukan oleh sayap penelitian dan intelektualnya. Saya, pengurus baru, dan Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES yang dipimpin Dr. Wijayanto mengambil inisiatif untuk meningkatkan peranan intelektual ini dengan mengadakan serangkaian diskusi publik selama dua tahun tanpa henti. Tujuannya adalah membangun semangat intelektualitas. Diskusi yang digelar tidak terbatas pada kalangan akademisi saja, tetapi juga melibatkan para jurnalis dan lainnya. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian ditulis sebagai makalah dan dipublikasikan di media massa dalam jumlah ratusan atau bahkan ribuan.

Banyak ilmuwan terlibat dalam kegiatan tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ujung dari dinamika intelektualitas ini adalah menulis paper, yang kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Buku ini merupakan buah dari kerja intelektual selama tidak kurang dari dua tahun terus-menerus, yang memuat sublimasi pemikiran dari para ilmuwan sosial politik dari berbagai negara dan belahan dunia.

Lahirnya kelompok ilmuwan ini bersama LP3ES menandai era kebangkitan lembaga yang tahun ini genap berusia setengah abad (50 tahun). Langkah-langkah selanjutnya akan lebih mudah dilakukan karena mesin intelektual sudah berjalan. Dinamika baru

sudah dimulai. Kegiatan-kegiatan kepeloporan dalam LP3ES juga sudah dimulai, seperti Sekolah Demokrasi LP3ES, Sekolah Riset dan *Polling*, Riset *Big Data*, dan kelanjutan publikasi Pemikiran Bung Hatta dan lain-lain. Lebih jauh, kerjasama dan *network* LP3ES terus dibangun dengan lembaga-lembaga ternama di dalam maupun di luar negeri.

Selamat menikmati buah pemikiran para intelektual ini!

Prof. Didik J Rachbini, Ph.D.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES

Demokrasi Tanpa *Demos*: Sebuah Pengantar

*Wijayanto, Aisah Putri Budiatri dan
Herlambang P Wiratraman*

“Negara meraung-raung
menjemput warganya yang terlantar
dan terlambat
ia selamatkan...”

Joko Pinurbo

“Hari-hariku terbuat dari Innalillahi”.

Joko Pinurbo

“In this hour, I do not believe that any darkness will endure!”

J.R.R. Tolkien

The Pandemic Has a New Epicentrum: Indonesia! Demikian judul *headline* harian *New York Times* (NYT) pada tanggal 17 Juli 2021. *Ya*, buku ini lahir di tengah gelombang kedua pandemi Covid-19 yang menghantam sangat keras negeri ini. Melengkapi berita NYT, saat Pengantar ini ditulis, situs *Worldometer* mencatat bahwa per 19 Juli Indonesia merupakan negara dengan kasus baru tertinggi di dunia selama satu minggu terakhir dengan angka 350.273, di atas Inggris (313.235), Brazil (286.634), India (269.688) dan USA (203.082). Sementara itu, dari sisi jumlah kematian karena

Covid-19 Indonesia berada di urutan ke-2 dunia dalam satu minggu terakhir yaitu sebanyak 7.118 jiwa di bawah Brazil (8.716), serta di atas Rusia (5.417), India (3.871) dan Kolombia (3.481).

Statistik di atas bukan hanya sekadar angka, karena hari-hari ini berita kematian seakan mengalir tanpa henti. Di media sosial, di group-group *Whatsapp*, dan di media massa, hampir setiap hari kita membaca berita tentang saudara atau kawan yang kita kenal secara personal meninggal atau ditinggalkan keluarganya karena virus Covid-19 ini. Tak hanya itu, kita pun menjadi lebih sering lagi mendengar kabar keluarga atau kawan yang terpapar virus ini. LP3ES bukanlah perkecualian. Tak sedikit aktivis lembaga ini yang terpapar dan kemudian sembuh. Namun ada beberapa anggota keluarga yang meninggal. Tak heran, jika pada suatu hari di bulan Juli penyair Joko Pinurbo yang dengan muram menulis di *Twitter*nya: “*Hari-hariku terbuat dari Innalillahi*”.

Adalah tidak mudah untuk tetap menjaga ketenangan batin, keteguhan hati dan kejernihan pikir untuk fokus dalam kerja pada masa seperti ini. Meskipun demikian, kami bertekad bahwa ikhtiar untuk mengawal demokrasi tidak boleh berhenti. Tekad ini lahir dari keprihatinan tentang buruknya situasi demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami kemunduran yang teramat serius sebagaimana diteorikan oleh para sarjana ilmu politik dalam berbagai istilah: *defective democracy*,¹ *democratic setbacks*,² *democratic regression*,³ *democratic deconsolidation*,⁴ *democratic decline*,⁵ *authoritarian turn*,⁶ *democratic backsliding*,⁷ *democratic recession*,⁸ *illiberal*

¹Marcus Mietzner, “Coercing loyalty: Coalitional presidentialism and party politics in Jokowi’s Indonesia”, *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 2016, diunduh dari <https://doi.org/10.1355/cs38-2b>.

²Vedi R. Hadiz, “Indonesia’s year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism?”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 2017, diunduh dari <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>.

³Edward Aspinall & Eve Warburton, “Indonesia: The Dangers of Democratic Regression”, ICSPS 2017, 2018, diunduh dari: <https://doi.org/10.2991/icps-17.2018.1>.

⁴Marcus Mietzner, *op. cit.*

⁵Thomas P. Power, “Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 2018, diunduh dari: <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
Ibid.

⁷Edward Aspinall & Marcus Mietzner, “Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 2019, diunduh dari: <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>.

⁸*Ibid.*

democracy,⁹ *nondemocratic pluralism*,¹⁰ *recession of democracy*,¹¹ *neo authoritarianism*,¹² *authoritarian innovation*,¹³ dan *authoritarian turn*.¹⁴

Bahkan, kami menginsyafi bahwa ikhtiar memperjuangkan demokrasi di Indonesia sudah seharusnya lebih ditingkatkan lagi di masa pandemi. Kami berpendapat bahwa buruknya penanganan pandemi ini justru merupakan refleksi paling konkret dari kemunduran demokrasi. Sebagaimana diteorikan oleh Diamond,¹⁵ Mietzner,¹⁶ Aspinall,¹⁷ juga Warburton dan Power,¹⁸ kemunduran demokrasi merupakan satu proses di mana aktor-aktor yang terpilih secara demokratis memungguni nilai-nilai dan institusi demokrasi, maka pengabaian nyawa warga negara di masa pandemi merupakan tumbal yang tak terhindarkan dari kemunduran demokrasi dalam wujudnya yang paling brutal. Dalam suasana pandemi inilah ide penulisan buku ini lahir, dan selama proses pandemi ini pula proses penulisan buku ini berlangsung hingga terbit dan bertemu pembaca.

Ide awal buku ini lahir pada pengujung tahun 2020 saat kami menggagas perlunya mengundang ilmuwan dari seluruh dunia untuk menulis refleksi bersama atas situasi demokrasi di Indonesia dalam rangka ulang tahun ke-50 LP3ES. Untuk itu kami berniat melakukan *call for paper* kepada para ilmuwan terpilih yang mau secara sukarela menulis untuk memperingati ulang tahun lembaga

⁹Edward Aspinall & Eve Warburton, *op.cit.*

¹⁰Edward Aspinall & Marcus Mietzner, "Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia", *Journal of Democracy*, 30(4), 2019, diunduh dari: <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>.

¹¹M. Faishal Aminuddin, "Populist Promises, Democratic Fissures: Indonesia and the Philippines", 15(1), 2020.

¹²Lihat Herlambang Perdana Wiratraman, "Pemilu dan neo-otoritarianisme", Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN), (November), 2018.

¹³Marcus Mietzner, "Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism", *Democratization*, 2019, diunduh dari: <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.

¹⁴Wijayanto, *et. al.*, *Outlook Demokrasi LP3ES: Menyelamatkan Demokrasi* (Depok: LP3ES, 2020)

¹⁵Larry Diamond, *op. cit.*, 2020, hlm.1.

¹⁶Marcus Mietzner, "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia", *Pacific Affairs*, 91(June), 2018, diunduh dari: <https://doi.org/10.1080/00324728.2012.754486>.

¹⁷Edward Aspinall & Marcus Mietzner, *op. cit.*, 2019, hlm.301.

¹⁸Eve Warburton & Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion", *Contemporary Southeast Asia*, 41, 2019.

bersejarah ini. Dari sana muncul ide untuk sekaligus mengundang para ilmuwan itu untuk berbicara dan mempresentasikan tulisannya di satu forum diskusi mingguan. Tentu saja, karena ia sukarela, kami membebaskan kepada mereka untuk memilih hanya menjadi pembicara seminar ataupun hanya menyumbangkan tulisan saja. Forum itu dibawakan dalam bahasa Indonesia atau dwibahasa (dengan bahasa Inggris) dan ditayangkan di kanal *Youtube* LP3ES sehingga para jurnalis dan masyarakat bisa mengikutinya. Niatnya sederhana: memenuhi ruang publik dengan konten yang bermutu sehingga keriuhan ruang publik kita tidak hanya dipadati oleh kedangkalan.

Forum itu kemudian kami beri nama Forum 100 Ilmuwan. Seperti namanya, kami memang berniat menghadirkan tak kurang dari 100 ilmuwan sosial politik di seluruh dunia untuk melakukan refleksi bersama LP3ES. Di forum itu, 3-4 orang ilmuwan sosial politik dari berbagai negara di dunia hadir setiap minggu, untuk berbicara di *webinar* LP3ES tentang berbagai tema. Kami masih ingat *webinar* pertama digelar pada hari Jumat, 30 Oktober 2020 tentang konflik Papua dengan menghadirkan, antara lain Cahyo Pamungkas dari LIPI. Panel terakhir berlangsung pada 5 Juni 2021 tentang manifesto peradaban ekologis untuk Indonesia yang menghadirkan Gerry van Klinken dari KITLV Belanda. Selama tujuh bulan antara akhir Oktober dan awal Juni itu, secara total berlangsung 28 *webinar*. Dengan kata lain, rata-rata empat *webinar* setiap bulan selama tujuh bulan. Itu artinya seminggu sekali kami hadir dengan diskusi “berat” yang menghadirkan ilmuwan dari banyak wilayah di Indonesia maupun dari luar negeri, dan kemudian ditayangkan melalui kanal *Youtube* sehingga dapat dinikmati oleh khalayak banyak. Ward Berenschot, rekan LP3ES yang juga profesor di Amsterdam dan peneliti di KITLV pernah berkelakar kepada Wijayanto, salah satu editor buku ini: “*You are a champion of webinars!*”

Tercatat, ada 134 ilmuwan sosial politik (91 laki-laki dan 43 perempuan) yang bergabung bersama kami, baik berbicara dalam *webinar*, mengirimkan tulisan, ataupun berbicara dan mengirimkan tulisan sekaligus. Dari 134 ilmuwan tersebut, 77 orang (57 laki-laki dan 20 perempuan) di antaranya menuliskan refleksi kritis dan

memercayakannya kepada kami untuk diterbitkan di dalam buku ini. Mereka tidak hanya ilmuwan sosial politik dari Indonesia, namun juga 19 *Indonesianist* dari berbagai negara: Kanada, Australia, Norwegia, Jerman, Tiongkok, Singapura, Inggris, Amerika, Belanda, Perancis, dan Jepang.

Keragaman akademisi ini penting karena beberapa alasan. *Pertama*, kami ingin mengambil satu inisiasi yang berisi akademisi lintas negara namun dimotori oleh ilmuwan politik Indonesia sendiri. Di tengah terbatasnya publikasi kajian politik Indonesia yang berbahasa Indonesia dengan melibatkan kolaborasi ilmuwan Indonesia dan asing, semoga ini bisa menjadi langkah kecil yang berarti. Kami duga, buku ini dan Forum 100 Ilmuwan menjadi bentuk publikasi studi sosial politik di Indonesia pertama yang berhasil mengumpulkan pemikir politik Indonesia lintas negara terbanyak sejauh ini. *Kedua*, para akademisi ilmu sosial politik itu hadir dalam berbagai topik dengan cara pandang yang sangat kaya dan beragam. Tak hanya tentang demokrasi sebagai sebuah konsep, namun banyak paparan yang berbasis pada kajian empiris. Beragam studi empiris itu melihat di antaranya persoalan lembaga-lembaga demokrasi, korupsi, konflik, gender, lingkungan dan lainnya. Topik kajian yang luas ini penting untuk memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi Indonesia tidak hanya terkait dengan lembaga-lembaga demokrasi, Pemilu dan elite, seperti yang telah banyak dikaji dalam publikasi tentang kemunduran demokrasi Indonesia saat ini,¹⁹ namun lebih jauh dari itu telah menggerogoti banyak aspek persoalan dan hampir menyentuh seluruh lini kehidupan berbangsa kita.

Buku ini kami bagi atas 12 kategori tematik: (1) agama, negara dan demokrasi; (2) partai politik, pemilu dan demokrasi; (3) media, internet dan kemunduran demokrasi; (4) korupsi dan

¹⁹Sebagai contoh lihat: Edward Aspinall & Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society* (Singapore: ISEAS, 2010); Edward Aspinall & Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca & London: Cornell University Press, 2019); Vedi R. Hadiz, "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.53, No.3, 2017; Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi & Eve Waburton, "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia," *Democratization*, Vol. 27, Issue 4, 2019; Eve Waburton & Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency, and Popular Opinion," *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.41, No.2, 2019.

penanggulangannya; (5) gender, lembaga demokrasi dan demokratisasi; (6) politik lokal; (7) konflik, kekerasan dan keamanan; (8) kerusakan lingkungan dan kemunduran demokrasi; (9) populisme dan politik identitas; (10) politik kewargaan; (11) pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan demokrasi; dan (12) menimbang demokrasi. Tema-tema ini kami harapkan dapat memayungi berbagai kajian dan ulasan para penulis, meski tentu saja kami sadari bahwa satu artikel di dalam buku ini bisa membahas aspek yang bersinggungan antar-tema. Berikut adalah penjelasan singkat atas berbagai tulisan yang terkategori dalam berbagai tema tersebut.

Agama, Negara dan Demokrasi

Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, pembahasan tentang demokrasi di Indonesia dan keterkaitannya dengan agama selalu menarik. Karena itulah, bagian pertama dari buku ini kemudian membahas tentang agama, negara dan demokrasi. Bowo Sugiarto membahas relasi agama, negara dan demokrasi pasca Soeharto. Dalam babnya, ia menyampaikan bahwa meski telah demokratis, Indonesia masih memiliki masalah kebebasan beragama. Situasi ini semakin pelik karena berkelindan dengan karakter Indonesia sebagai negara oligopoli dan dinamika politik lokal yang cenderung mempertahankan dominasi kelompok agama mayoritas di wilayahnya. Relasi agama dan demokrasi juga dikaji oleh Daniel Peterson dan Luthfi Makhasin. Peterson secara saksama mengeksplorasi bagaimana UU Penodaan Agama telah dipolitisasi hingga merusak tatanan hukum dan demokrasi Indonesia yang baru lahir. Ia menyatakan, bahwa jika Indonesia bukanlah negara teokratis, maka tatanan hukum seperti ini amat perlu direformasi. Sementara itu, Makhasin mengidentifikasi dalam tulisannya bahwa Islamisme merupakan salah satu kontributor utama kemunduran demokrasi. Untuk mencegahnya menjadi lebih buruk, Makhasin menegaskan perlunya penguatan Islam di ruang publik dan akomodasi Pemerintah terhadapnya patut disertai oleh moderasi sikap beragama dan berpolitik.

Problem demokrasi yang terkait dengan agama juga menjadi bahasan Yanwar Pribadi yang menyoroti persoalan politik penyertaan umat Islam dalam kehidupan demokrasi pasca Soeharto di Indonesia.

Pribadi menyatakan bahwa Indonesia, sejak era kepemimpinan Soekarno hingga Jokowi saat ini, telah menempatkan keterwakilan kelompok muslim yang tinggi di dalam kabinet. Namun demikian, Pribadi menegaskan bahwa penting untuk melihat lebih jauh bagaimana mereka mampu mewujudkan pemenuhan hak sipil, politik dan sosial seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim. Perspektif menarik disampaikan oleh Diego Fossati dalam artikelnya tentang perpecahan politik Islam. Berbeda dengan perspektif umum yang melihat perpecahan politik Islam sebagai hal yang melemahkan demokrasi, Fossati justru memusatkan perhatiannya sebagai kekuatan demokrasi. Perpecahan politik Islam dalam hal ini membantu kita memahami tingkat kepuasan publik yang meningkat terhadap demokrasi dan partisipasi. Sementara itu, Asep Usman Ismail dalam tulisannya menggambarkan tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi. Kombinasi pendekatan tasawuf dengan etika demokrasi diyakini oleh Ismail akan menyelamatkan demokrasi Indonesia ke depan.

Artikel terakhir dalam kategori agama dan demokrasi, ditulis oleh Chris Chaplin yang memaparkan bagaimana demokrasi telah berdampak pada cara aktivis konservatif Islam beroperasi. Berbasis pada penelitian etnografinya terhadap kelompok *Wahdah Islamiyah*, Chaplin memperlihatkan bagaimana dinamika aktivis Islam dalam memahami dan memaknai konsep kewarganegaraan, jabatan politik dan identitas nasional. Dari tulisannya, Chaplin juga menunjukkan situasi di mana demokrasi telah memberikan ruang sipil bagi organisasi Islam untuk menyempurnakan visinya tentang masyarakat.

Partai Politik, Pemilu dan Demokrasi

Partai politik dan Pemilu menjadi topik pembahasan yang umum dikaitkan dengan dinamika demokrasi di Indonesia. Aspek kepartaian dan kepemiluan ini tak luput menjadi diskusi beberapa penulis artikel di dalam bagian kedua dari buku ini. Marcus Mietzner menyoroti kompleksitas persoalan sistem elektoral Indonesia yang menurutnya patut segera direformasi jika demokrasi ingin diperkuat. Mietzner melihat perlu ada perubahan fundamental dalam sistem elektoral di Indonesia, mulai dari sistem keuangan politik hingga

aturan-aturan teknis kepemiluan. Sementara itu, dalam tulisannya, Djayadi Hanan juga mengeksplorasi problem partai politik, yang kemudian ia kaitkan dengan sistem Pemilu. Menurut Hanan, selain persoalan demokrasi internal partai, keterikatan yang lemah antara partai dengan masyarakat menjadi salah satu kunci permasalahan demokrasi Indonesia saat ini. Ia menawarkan perubahan desain keserentakan Pemilu sebagai solusinya. Pada bab lainnya, keterkaitan partai dengan Pemilu dibahas oleh George Towar Ikbal Tawakkal dengan mengeksplorasi praktik politik uang. Baginya, praktik politik uang harus dilihat dengan kaca mata yang lebih luas dari sekadar logika transaksional yang negatif terhadap demokrasi. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, uang, dalam praktik politik uang, dipersepsikan oleh pemilih sebagai panggilan persahabatan dan kepedulian dari calon pemimpin kepada masyarakat.

Firman Noor, Andreas Ufen, dan Aisah Putri Budiatri pada masing-masing tulisannya mengeksplorasi persoalan partai politik di era Reformasi. Firman Noor menyatakan bahwa kualitas partai politik saat ini belum memadai untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Noor menyatakan partai politik masih terbelit berbagai persoalan, mulai dari persoalan kepemimpinan, pelembagaan partai, aturan main hingga lingkungan politiknya yang buruk. Seperti Firman Noor, Andreas Ufen mengelaborasi secara komprehensif persoalan-persoalan partai politik di Indonesia. Ufen menyatakan bahwa partai politik telah menjadi personal dan bergantung pada orang-orang kaya, partai politik cenderung fokus pada persoalan simbolis dan bukan hal-hal yang programatis, partai menjadi tidak ideologis, dan mereka terjebak pada hubungan klientelistik. Hal ini kemudian diperburuk dengan kebangkitan populisme dalam beberapa tahun terakhir. Baik Noor maupun Ufen, keduanya menekankan tentang mendesaknya langkah perbaikan partai politik ke depan. Persoalan partai secara lebih spesifik dituliskan oleh Aisah Putri Budiatri yang membahas realitas terjadinya intervensi negara terhadap partai-partai berkonflik. Ia menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya intervensi negara terhadap partai politik, maka dua aspek kunci yang perlu dilakukan adalah mengkonstruksi ikatan partai yang berbasis kuat pada ideologi serta membentuk anggota partai dan/atau politisi yang beretika.

Tidak hanya tentang partai politik, Syarif Hidayat juga membahas tentang birokrasi pemerintah dan lembaga perwakilan sebagai institusi demokrasi yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya stagnasi, atau bahkan “arus-balik demokrasi” di Indonesia saat ini. Ketiga lembaga ini disebutnya lebih berfungsi sebagai instrumen elite, dan tidak efektif merepresentasikan kepentingan publik. Situasi ini kemudian berdampak pada terus memburuknya kinerja lembaga demokrasi, yang berpeluang kemudian menjebak demokrasi Indonesia pada bentuk demokrasi ilusif.

Media, Internet dan Kemunduran Demokrasi

Bagian ketiga buku ini didedikasikan untuk mengupas dinamika terbaru demokrasi kita: demokrasi digital dan media. Salah satu pertanyaan utama yang menjadi bahan refleksi para penulis bagian ini adalah: *apakah media massa dan internet mendorong atau justru menghambat demokrasi, dan mengapa?* Lintang Ratri Rahmiaji, Eni Maryani dan Masduki mengajukan kritik tentang belum optimalnya media kita dalam menyuarakan kepentingan publik dan mendorong demokrasi. Bagi Rahmiaji, persoalan terletak pada Jakarta-sentrisme konten dan sekaligus regulasi penyiaran di Indonesia. Pemberdayaan lokalitas terancam ditindas oleh kepentingan industri nasional secara ekonomi dan dibatasi aksesnya oleh sentralisasi penyelenggaraan. Akibatnya, media bak melipat Indonesia ke dalam (kekuasaan) Jakarta, tidak hanya meniadakan publik, tapi juga demokrasi. Sementara itu, Maryani melihat persoalan terletak pada kuasa kapital dan kuasa negara yang melakukan intervensi terlalu jauh kepada media. Senada dengan Maryani, Masduki juga mengkritisi peran uang yang mengancam independensi media kita. Menurutnya, ancaman pers sebagai pilar demokrasi tidak hanya dari pemilik yang *notabene* adalah kaum oligarki tetapi dari instrumen uang itu sendiri, yang sumber utamanya berasal dari penyelenggara negara.

Mengawali refleksi tentang kaitan internet dan demokrasi, Kuskridho Ambardi menyatakan bahwa internet tak serta merta menjadi kabar baik bagi demokrasi. Dia menyoroti keberadaan raksasa korporasi teknologi digital dunia yang tak ubahnya telah menjadi semacam monster yang memakan segalanya (*leviathan*).

Menurutnya, adopsi e-demokrasi tanpa menjinakkan *digital leviathan* justru mengabaikan isu krusial dalam demokrasi, yakni perlunya mempersoalkan redistribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Ni Made Ras Amanda juga menghadirkan jawaban yang senada. Menurutnya, tanpa kritisisme, internet dapat menghadirkan polarisasi karena algoritma akan menghadirkan fenomena *echo chamber effect* atau *bubble theory*. Sistem ini membuat warganet seperti hidup dalam gelembung berisikan berita-berita yang telah disesuaikan keinginan dan kebiasaan warga tersebut dan membuat mereka menjadi tertutup pada isu atau pandangan kelompok lain.

Harry Seldadyo dengan sangat menarik mengungkapkan bahwa absennya basis ekonomi yang baik telah melahirkan keterpurukan e-demokrasi di Indonesia. Di sini dia merujuk pada teori Lipset yang pada intinya mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi adalah prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi. Bagi Seldadyo, itu juga berlaku bagi e-demokrasi. Sedikit berbeda dari tiga penulis sebelumnya, tulisan Merlyna Lim menyampaikan argumen yang lebih bernuansa. Dia menyampaikan bahwa internet akan memfasilitasi munculnya aktivisme media sosial yang bisa menjadi instrumen perjuangan warga biasa untuk melawan kekuatan raksasa seperti dalam kasus dukungan *facebookers* dalam pelemahan KPK dan koin untuk Prita. Namun ia juga menyampaikan bahwa aktivisme itu kandas jika berhadapan dengan kekuatan politik oligarkis yang didukung oleh narasi dominan yang telah mengakar pada publik secara luas.

Korupsi dan Penanggulangannya

Kajian dalam isu korupsi yang menjadi bagian kelima buku ini ditulis dalam lima artikel. Artikel “Koreksi Total Kinerja Demokrasi dan Antikorupsi” ditulis oleh Ahmad Khoirul Umam. Ia menegaskan analisis bagaimana kualitas kinerja pembangunan demokrasi memiliki korelasi yang sangat dekat dengan agenda antikorupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan. Utamanya, Umam melihat korupsi sebagai konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkontrol. Sedangkan Ahmad Suaedy dengan menarik menuliskan “Melacak Basis Etika Antikorupsi di Indonesia: Menyandingkan Gus Dur dengan Pangeran Diponegoro”. Baginya, Diponegoro dan Gus Dur,

yang merefleksikan tradisi dan kultur sendiri, memiliki nilai yang lebih kuat daripada modernisasi yang salah secara paradigmatik.

Studi soal *Regulatory Capitalism* dituliskan Michael Buehler, dengan melihat tantangan pemberantasan korupsi pada rantai pasokan sektor hulu minyak dan gas di Indonesia. Ia menegaskan strategi kapitalisme regulasi tak efektif menghalau korupsi karena mengabaikan konteks politik di mana badan pengawas dan perusahaan itu bekerja. Sementara itu, peneliti dari LP3ES, Malik Ruslan dalam bagian ini menuliskan isu korupsi dengan kerangka kritis atas kegagalan memfungsikan demokrasi sebagai instrumen untuk mengatasi musuh terbesar bangsa bernama korupsi itu. Akhir bagian ini dipungkasi oleh dua penulis, Paul Kenny dan Eve Warburton, yang mengelaborasi tentang praktik suap di Indonesia, terutama di sektor bisnis dengan dua pengamatan utama mengenai sifat korupsi dan hubungan bisnis-negara di Indonesia.

Gender, Lembaga Demokrasi dan Demokratisasi

Seperti menjadi catatan penting di dalam tulisan Kurniawati Hastuti Dewi, Gender atau lebih khusus perempuan seringkali luput dilihat sebagai aspek penting dalam demokrasi. Padahal, aspek ini sangat penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Karena itulah, beberapa penulis di dalam buku ini secara spesifik menekankan keterhubungan gender dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kurniawati Hastuti Dewi mengelaborasi kontribusi-kontribusi penting perempuan dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia selama ini, baik di aras nasional maupun lokal. Senada dengan Dewi, Julia Suryakusuma juga menggambarkan dalam tulisannya bagaimana perempuan merupakan garda depan demokrasi yang telah menginisiasi perubahan rezim otoritarian Soeharto di Indonesia. Ia kemudian menjelaskan bahwa saat ini, atau yang disebutnya sebagai era MOOI (militarisme, otoritarianisme, oligarki dan Islamofasisme), memberikan tantangan yang tak jauh berbeda dari era Orde Baru, terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya seperti LGBTIQ+, kelompok agama minoritas dan kepercayaan.

Pembahasan tentang gender dan demokrasi dielaborasi pada konteks yang lebih spesifik oleh Muhammad Ichsan Kabullah, serta Nurul Hasfi, Sunarto dan Amida Yusriana. Ichsan Kabullah melihat fenomena kemenangan perempuan dalam lembaga legislatif. Dalam artikelnya, ia menggagas sebuah konsep yang disebut neo-ibuisme, sebagai hal yang lebih efektif bekerja menjadi strategi elektoral untuk mendorong partisipasi perempuan dalam parlemen. Di sini, Kabullah juga mencatatkan pentingnya konsolidasi antaranggota legislator perempuan untuk berperan aktif memperjuangkan aspirasi perempuan di parlemen. Sementara itu, Hasfi dan rekan-rekannya membahas kepemimpinan jurnalis perempuan. Riset mereka memperlihatkan bahwa jurnalis perempuan, meski telah menduduki posisi kepemimpinan, masih mendapatkan tantangan yang bersifat diskriminatif, baik di lingkungan internal maupun eksternal industri media. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan gender masih membayangi perempuan pekerja, tanpa terkecuali jurnalis perempuan, di tengah era demokrasi digital saat ini.

Politik Lokal

Bagian berikut terkait politik lokal, mendiskusikan isu yang menghubungkan sumber daya alam, hukum dan relasi penanganan konflik serta kelembagaannya. Tulisan Wahyu Prasetyawan bertajuk “Dalam Cengkeraman Elite: Kenduri di Tingkat Lokal” memperbincangkan betapa penguasaan sumber-sumber daya politik dan ekonomi mampu membuat elite politik lokal menjalankan agenda mereka tanpa adanya proses cek dari kekuatan sosial lainnya. Kritik pula terjadi di Bali atas lahirnya Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Kadek Dwita Apriani menulis soal gejala kemerosotan demokrasi di Bali, terutama dikaitkan dengan intervensi negara terhadap kemandirian desa adat. Kondisi ini disebutnya sebagai “demokrasi putar-balik” atau “kemerosotan demokrasi”.

Dalam tulisan “Menata Pluralisme Hukum di Indonesia: Pelajaran dari Aceh”, peneliti Arfiansyah menegaskan soal pengakuan dan dukungan Pemerintah terhadap lembaga adat yang telah mendorong desa untuk menangani hampir semua perkara, bahkan ketika perkara tersebut tidak termasuk dalam otoritas yang diberikan

oleh Pemerintah melalui *Qanun*. Ia mencatat bahwa pengalaman Aceh dapat menjadi salah satu pelajaran dan rujukan penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan hukum dan menata pluralisme hukum yang liar selama ini.

Pada tulisan lain, Isnati Kuswini dengan cara pandang yang menarik melihat bagaimana praktik demokrasi lokal dalam sistem pengambilan keputusan suku-suku di Kampar. Melalui artikelnya, Kuswini menunjukkan bahwa stigma ketertinggalan masyarakat adat adalah keliru, karena pranata adat dan sistem tata kelola di Kampar membuktikan bahwa skema demokrasi telah hidup sejak lama. Namun, demokrasi lokal ini terancam eksistensinya oleh fenomena semakin hilangnya tanah ulayat yang tengah berlangsung saat ini.

Konflik, Kekerasan dan Keamanan

Konflik, kekerasan dan keamanan menjadi satu spektrum bahasan lain di dalam buku ini untuk melihat progres demokrasi Indonesia era Reformasi. Diskusi topik ini dibuka oleh tulisan Cahyo Pamungkas yang memaparkan bahwa demokrasi yang bercirikan pembatasan kebebasan berekspresi, pembungkaman oposisi dan penggunaan politik identitas nasionalisme regresif saat ini akan menumbuhsuburkan ekosistem konflik yang telah ada, terutama konflik terkait dengan separatisme, intoleransi dan radikalisme. Potensi konflik yang semakin besar tentunya menjadi berita buruk terutama jika melihat risiko negatif yang ditimbulkannya, seperti apa yang menjadi catatan Lya Anggraini dalam tulisannya. Anggraini menyatakan bahwa lemahnya kehadiran negara dalam bentuk kebijakan bagi Orang Asli Papua (OAP) korban konflik, khususnya perempuan, telah membuat mama-mama Papua terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan, kemiskinan dan kekerasan.

Masih terkait dengan konflik di Timur Indonesia, Alexandre Pelletier dan Jessica Soedirgo kemudian membahas konflik dengan mempelajari mengapa kekerasan dapat mengalami de-eskalasi. Hasil riset Pelletier dan Soedirgo tentang konflik di Maluku menunjukkan bahwa sistem de-eskalasi konflik yang mapan amat diperlukan untuk mencegah berlangsungnya kekerasan di wilayah-

wilayah konflik. Sistem de-eskalasi, namun demikian, tak muncul secara alamiah, melainkan didorong juga oleh insentif sosial dan ekonomi politik yang didapatkan oleh aktor-aktor non-pemerintah pro-perdamaian di wilayah konflik itu. Tulisan Masaaki Okamoto menjadi bab lain yang membahas tentang kekerasan dalam buku ini. Dengan mengangkat Pemuda Pancasila sebagai studi kasus, Okamoto memperlihatkan bagaimana aktor kekerasan non-negara seperti PP dapat menunjukkan eksistensinya dengan berpartisipasi pada ruang-ruang politik formal, baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Namun demikian, Okamoto menyatakan bahwa tidak ada jaminan ke depannya, relasi negara dengan aktor kekerasan non-negara seperti ini akan bertahan dan kemudian berdampak pada menguatnya demokrasi.

Bab terakhir dalam diskusi tentang topik ini ditulis oleh Muhamad Haripin yang membahas tentang problem pengawasan sektor keamanan dan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dari catatannya, Haripin menyampaikan bahwa meski pranata pengawasan sektor keamanan pasca Soeharto telah relatif baik, namun pada tataran implementasinya masih menyimpan banyak persoalan. Oleh karena itu, Haripin menilai perlunya koreksi atas model tata kelola dan prosedur pengawasan sektor keamanan ini.

Kerusakan Lingkungan dan Kemunduran Demokrasi

Bagian ke-8 buku ini membahas kaitan antara kerusakan lingkungan dan kemunduran demokrasi. Tulisan-tulisan dalam bagian ini secara jernih menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan bencana merupakan refleksi kemunduran demokrasi yang ditandai dengan pengabaian kepentingan publik. Yogi Setya Permana, misalnya, dengan jelas mengilustrasikan bahwa banjir dan asap, seperti Kalimantan, adalah konsekuensi dari rusaknya tata ruang karena kuatnya praktik klientelisme dan lemahnya kontrol publik. Dalam risetnya, Permana menemukan bahwa provinsi dengan skor indeks demokrasi yang rendah ternyata memiliki frekuensi banjir yang tinggi. Sementara itu, Dirk Tomsa menggarisbawahi kecenderungan Pemerintah untuk membungkam kritik, khususnya kritik terhadap

tindakan pengrusakan hutan, telah berdampak mematikan. Lebih jauh, dia menggugat lobi elite pengusaha terhadap Pemerintah yang telah menyebabkan longgarnya moratorium pemberian izin pembukaan hutan baru oleh perusahaan. Dalam konteks ini, dapat dimengerti jika Gerry van Klinken melihat persoalan kerusakan alam bukan hanya persoalan teknis semata namun juga persoalan politik dan budaya. Lebih jauh, ia mengusulkan perlunya satu manifesto bagi seluruh elemen bangsa untuk segera bergerak menghentikan kerusakan lingkungan di Indonesia dengan langkah besar yang nyata dalam rangka membangun satu peradaban ekologis untuk Indonesia.

Populisme dan Politik Identitas

Bagian berikutnya menggabungkan dua isu terkait, yakni populisme dan politik identitas. Aris Arif Mundayat dalam tulisannya “Mengembalikan Republik Melalui Populisme Pancasila: Mungkinkah?”, membangun argumen bahwa kegagalan memahami Pancasila sebagai *Weltanschauung* atau *Philosophische Groondslag* adalah persoalan serius. Kritiknya, Pemerintah mengartikan Pancasila sebagai “pemukul” musuh, bukan sebagai “paradigma republikanisme”.

Dalam tulisan yang lain berjudul “Demokrasi dan Populisme Islam,” Azyumardi Azra membahas kebangkitan dan kemunduran populisme Islam atau politik identitas Islam di tengah dinamika demokrasi Indonesia. Argumen utamanya, *pertama*, populisme Islam atau politik identitas Islam lebih merupakan *political expediency* daripada kemunculan *genuin* yang berakar kuat. *Kedua*, populisme Islam atau politik identitas Islam bukan merupakan tantangan serius bagi masa depan politik atau demokrasi Indonesia. Sementara itu, aktivis R. Yando Zakaria mengangkat tulisan “Mempertimbangkan Kewarganegaraan yang Majemuk untuk Indonesia yang Multikultural”. Dalam tulisan tersebut, Zakaria menyoroti persoalan pengaturan terkait kepentingan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sedangkan Zacky Khairul Umam, dalam tulisannya berjudul “Keluar dari Defisit Demokrasi: Persoalan Budaya dan Jati Diri”,

membuat argumen bagaimana mencari solusi perbaikan demokrasi dengan jalan melihat potensi sosial-budaya dari keislaman dan kebangsaan yang menjadi urat nadi penting dalam gerak kehidupan. Tantangan konseptual baru dikemukakan Musa Maliki, yang menjuduli artikelnya dengan “Penundaan Abstraksi Demokrasi dan Demokrasi Keindonesiaan”. Ia berargumen bahwa demokrasi cenderung mengalami penundaan makna, walaupun saat konsep demokrasi bertemu dengan realitasnya maka akan ditubuhkan ke dalam dirinya. Menurutnya, makna demokrasi sesungguhnya akan terus dinamis dan berkontestasi. Bagian ini dilengkapi dengan catatan menarik Saiful Mujani soal “Merajut Kebinekaan”, yang baginya, perlu lahir pemikiran-pemikiran keislaman untuk memperkuat sikap dan perilaku umat yang memperkuat rajutan kebinekaan negara-bangsa kita, sebagaimana pengalaman sebelumnya melalui pemikiran-pemikiran yang dikembangkan Cak Nur dan Gus Dur.

Politik Kewargaan

Dalam studi politik kewargaan, ada sejumlah artikel yang mengangkat perdebatan kekinian yang relevan dalam rangka mendiskusikan ulang soal kewargaan itu sendiri. Dalam tulisan “Covid-19 dan Kebingungan Masyarakat: Cermin Demokrasi Semu di Indonesia”, penulis kolaboratif Citra Indah Lestari dan Lintang Ratri Rahmiaji, mengajukan dua argumen menarik. *Pertama*, absennya informasi resmi justru dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi. *Kedua*, dalam kondisi darurat, pola komunikasi dua arah seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai katalis kolaborasi antara Pemerintah dengan rakyatnya. Sementara itu, Mirza Satria Buana, dalam tulisannya, menyatakan lembaga peradilan seharusnya dapat menjadi medium konsolidasi demokrasi, dan oleh karena itu perlu diperkuat secara kualitas maupun kualitas, agar dapat memberi pemenuhan hak-hak konstitusional yang kerap ditelikung oleh kebijakan elitis Pemerintah. Ia membawa catatan menarik tentang pengembangan wewenang *Constitutional Complaints* sebagai upaya memperkuat demokrasi dan negara hukum. Menambahi catatan Buana di bidang hukum, Sri Lestari Wahyuningroem mengajukan gagasan tentang peran masyarakat sipil untuk mendorong terwujudnya keadilan transisi

karena absennya peran negara dalam mengawal pelanggaran HAM di masa lalu. Ia menyebut hal ini sebagai strategi “jalur ganda” yang melibatkan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Beberapa tulisan di bagian ini juga mendiskusikan tentang ruang publik dan kebebasan warga. Usman Hamid di dalam tulisannya menekankan pada fenomena merosotnya ruang publik di Indonesia saat ini, yang diindikasikan oleh semakin menurunnya kualitas kebebasan berpendapat, kebebasan internet dan kebebasan beragama warga negara. Ia menyatakan bahwa represi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi ini menandai adanya pembiaran terhadap pelemahan jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia (HAM), yang bukan tidak mungkin berdampak pada kematian demokrasi. Masih mengenai kebebasan sebagai hak publik, Herlambang P. Wiratraman menulis soal penjinakan intelektual dan serangan terhadap kebebasan akademik. Argumennya, di tengah menguatnya rezim antisains, penjinakan dan “profesionalisme tukang” kian diperburuk oleh perangai intelektual itu sendiri, yakni pembohongan dan pengsubordinasian sains untuk peradaban kemanusiaan dan ekologi. Sementara Ward Berenschot dan Ahmad Dhiaulhaq dalam artikelnya menuliskan tentang Warga Tanpa Hak. Tulisan mereka berpusat pada mengapa perampasan tanah mudah dilakukan di Indonesia. Basis studinya adalah pada perusahaan kelapa sawit yang memperlihatkan kemudahan legalisasi dan legitimasi dalam mengakuisisi tanah rakyat.

Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan dan Demokrasi

Bagian ke-11 buku ini mendiskusikan sisi ekonomi politik dari demokrasi. Para penulis pada bagian ini menyepakati bahwa faktor ekonomi dan politik memiliki kaitan yang sangat penting dengan demokrasi. Secara langsung ataupun tidak, mereka meramalkan perdebatan klasik dalam ilmu politik: apakah pembangunan ekonomi merupakan prakondisi bagi demokrasi, ataukah sebaliknya, demokratisasi adalah prakondisi bagi terwujudnya kesejahteraan ekonomi? Bagi Faisal Basri, jawaban atas pertanyaan itu jelas: demokrasi ekonomi dan demokrasi politik harus berjalan seiring.

Baginya, demokrasi adalah prasyarat bagi kemajuan ekonomi dan, pada saat yang sama, kemajuan ekonomi akan memperkuat demokrasi. Basri menyatakan bahwa Indonesia perlu memperkuat demokrasinya agar tidak lagi terjerumus ke jurang krisis karena kekuatan eksekutif yang eksekutif dan parlemen yang tidak menjalankan fungsi hakikinya.

Dalam hal ini, Basri tidak sendirian. Dengan satu semangat yang sama, Budi Setiyono menekankan perlunya memperhatikan hak sosial ekonomi warga negara yang diiringi dengan penguatan demokrasi, yang ia rangkum dalam konsep “negara kesejahteraan”. Ia seakan meneguhkan pandangan para pemikir demokrasi substansial yang meyakini bahwa demokrasi baru bisa dikatakan telah terwujud manakala tak hanya hak sipil dan politik tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya warga, telah terpenuhi. Kaitannya dengan hal ini, Emil Salim menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak atas akses pendidikan sebagai bagian dari hak asasi budaya. Melalui tulisannya, ia membangun argumen bahwa salah satu akar dari penyebab rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Maka, pembenahan mutu pendidikan masyarakat adalah prasyarat penting dari kemajuan demokrasi.

Sayangnya, bagian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembangunan ekonomi dan demokrasi politik sering tak berjalan bersama. Terkadang pembangunan ekonomi mengabaikan demokrasi. Arif Budi Pratama menunjukkan betapa hasrat pembangunan ekonomi seringkali melupakan pentingnya pembangunan demokrasi. Dia menemukan satu pemandangan menarik di mana kata demokrasi semakin sedikit disebut dalam dokumen rencana pembangunan Jokowi dan berganti dengan pembangunan infrastruktur. Terkadang demokrasi politik melupakan pemerataan ekonomi. Toto Subandriyo menjelaskan betapa kesejahteraan petani seringkali dikorbankan dalam kebijakan liberalisasi pangan yang ditempuh Pemerintah. Kaum tani hanya mendapat perhatian manakala mereka dibutuhkan suaranya untuk memberi dukungan dalam Pemilu.

Dua tulisan terakhir dalam bagian ini mencoba menghadirkan penjelasan ekonomi politik tentang mengapa hak ekonomi politik warga sering dilupakan demi pembangunan ekonomi dan demokrasi.

Bagi Henky Wijaya, penjelasannya terletak pada keberadaan oligarki yang telah terbangun sejak masa Orde Baru dan mengalami evolusi di era Reformasi. Di sini, oligarki ia definisikan sebagai sekelompok elite kaya dan berkuasa yang membajak proses demokrasi demi kepentingan mereka sendiri yang berdampak pada tercerabutnya hak-hak warga negara (*demos*). Dengan napas argumen yang sama, Gabriel Facal, Gloria Truly Estrelita dan Sarah Anaïs Andrieu menguraikan analisis tentang peluang membangun gerakan sosial di tengah kepeungan kepentingan oligarki yang berideologi neoliberal. Mereka meyakini bahwa *demos* masih berpeluang untuk mengimbangi oligarki dan mendorong terwujudnya demokrasi jika berhasil membangun solidaritas di antara mereka dan mengkonsolidasikan diri pada ruang-ruang publik yang masih ada dan menjadikan momentum Pemilu untuk mendesak agenda mereka.

Menimbang Demokrasi

Bagian terakhir dari buku ini memuat gagasan atau refleksi atas konsep demokrasi itu sendiri. Kritik tajam atas demokrasi di Indonesia diajukan oleh Jeffrey A Winters yang menyebut demokrasi Indonesia sebagai demokrasi parsial bahkan semu. Hal ini karena demokrasi yang ada tidak punya alat yang efektif untuk membatasi atau menetralkan kuasa kekayaan yang sangat besar dan pengaruh para oligarki dan elite. Melanjutkan Winters, Eko Prasajo mengajukan gugatan atas maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi kita. Sementara itu, Iqra Anugrah menyoroti tiga tantangan demokrasi di Indonesia, meliputi penyempitan ruang demokrasi politik, kebijakan neoliberalisme dalam pembangunan, dan kenaikan konservatisme. Dalam artikel lainnya, Otto Gusti Madung mengajukan kritik tajam pada kecenderungan *anti-science regime* hari ini dalam penanganan pandemi. Lebih jauh, ia juga menyoroti kecenderungan antikritik Pemerintah untuk menghindari kegaduhan demi mengamankan investasi ekonomi.

Bagian terakhir ini tak hanya berisi kritik namun juga satu tawaran gagasan untuk membenahi demokrasi kita. Meuthia Ganie-Rochman mengajukan satu gagasan tentang perlunya pembaruan teori demokrasi dengan mempertimbangkan, dan sebagai konsekuensi dari, dua hal: revolusi digital dan Covid-19. Ia mengajukan gagasan

bahwa demokratisasi mestinya bukan hanya tentang perbaikan kapasitas negara untuk tujuan memenuhi prinsip kesejahteraan tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi non-negara di dalamnya. Selanjutnya, bagi Didin S Damanhuri, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari dalam praksis demokrasi kita sendiri yang ia nilai baik: “demokrasi musyawarah” (*deliberative democracy*). Baginya, musyawarah adalah salah satu praktik yang baik dalam demokrasi kita, yang menurutnya telah terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sementara itu, Olle Törnquist mengajukan gagasan yang lebih mendasar: perlunya menghadirkan pemikiran kiri dalam teorisasi demokrasi dan aktivisme sosial di Indonesia. Menurut Törnquist, pemikiran kiri yang ditindas selama Orde Baru dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengatasi situasi politik dalam menghadapi otoritarianisme, praktik *indirect rule* dan politik identitas.

Demokrasi Tanpa *Demos*

Dari berbagai ulasan dan eksplorasi penulis di dalam buku ini, juga dari puluhan *webinar* yang kami adakan, tampak bahwa ada problem serius dan kompleks yang membayangi demokrasi Indonesia. Berbagai survei publik yang dilakukan oleh lembaga riset, patut diakui, telah menggambarkan penerimaan dan kepercayaan rakyat yang kuat, atau setidaknya masih tinggi dan mendominasi, terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang baik.²⁰ Namun demikian, kompleksitas persoalan demokrasi yang dipaparkan oleh para penulis menunjukkan bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini secara perlahan justru berjalan meninggalkan rakyat dan

²⁰Lihat hasil riset berikut sebagai contoh: Survei LIPI tentang kondisi demokrasi di Indonesia pada tahun 2012 dan 2018; Survei Indikator tentang kondisi demokrasi Indonesia pada 2020; Survei SMRC tentang kondisi demokrasi di Indonesia pada 2020, 12 Oktober 2012, *LIPI*, “Publik Masih Percaya Sistem Demokrasi,” diakses dari: <http://lipi.go.id/berita/single/Survei-Publik-masih-Percaya-Sistem-Demokrasi/6922>; Fitria Chusna Farisa, 23 Agustus 2020; *Kompas Online*, “Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Jalannya Demokrasi Turun Tajam Selama Pandemi”, diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/23/14302411/survei-smrc-kepuasan-publik-terhadap-jalannya-demokrasi-turun-tajam-selama>; Bintoro Agung, 20 Juli 2018, *CNN Indonesia Online*, “Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi”, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>; Nanda Perdana Putra, 25 Oktober 2020, *Liputan 6 Online*, “Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Demokrasi di RI Turun Saat Pandemi Covid-19”, diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/4391519/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-demokrasi-di-ri-turun-saat-pandemi-covid-19>.

kepentingannya. Dirangkum dari berbagai tulisan dalam buku ini: lembaga demokrasi menjadi kian mandul dalam memainkan fungsinya untuk mewakili aspirasi rakyat; identitas, termasuk agama, media dan teknologi digunakan sebagai sarana oleh elite untuk memenuhi maksud dan keinginan kelompoknya sendiri; korupsi yang digunakan oleh sekelompok elite dan oligark untuk memperkaya diri dan menguasai sumber daya semakin menjadi-jadi; kerusakan lingkungan, ketimpangan gender, konflik berkepanjangan, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta kesakitan dan kematian akibat pandemi Covid-19 menjadi soal yang semakin meminggirkan posisi rakyat dalam demokrasi Indonesia.

“Demokrasi Tanpa *Demos*” yang menjadi judul dari buku, dan juga Pengantar buku ini, dimaknai sebagai demokrasi yang berjalan secara prosedural, namun pada praktiknya demokrasi tidak dijalankan untuk kepentingan rakyat sebagaimana semestinya karena demokrasi hanya dijadikan sebagai alat sekelompok elite oligark untuk berkuasa dan bersumberdaya. Demokrasi dalam pemaknaan ini telah meninggalkan asal makna yang disematkannya, yakni demokrasi *a la* Yunani yang berasal dari dua kata: *demos* dan *kratos*. *Demos* yang bermakna rakyat, dan *kratos* yang bermakna pemerintahan. Demokrasi *a la* Yunani ini, secara sederhana diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan atas dasar kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, “Demokrasi Tanpa *Demos*” tentu bersifat anomali, atau bahkan bertentangan.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kemunduran demokrasi yang melahirkan “demokrasi tanpa *demos*” terjadi? Daron Acemoglu dan James A Robison dalam karya monumental mereka *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty* menegaskan perlunya menjaga keseimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat sipil demi memelihara jalur sempit kebebasan sipil. Menurut mereka, jika negara terlalu kuat maka akan menjelma sebagai *leviathan* yang akan membunuh kebebasan sipil dan demokrasi. Sebaliknya, jika masyarakat sipil terlalu kuat dan negara terlalu lemah yang terjadi adalah kekacauan sosial yang terjadi karena ketiadaan tatanan.²¹ Terinspirasi oleh Acemoglu dan

²¹Daron Acemoglu dan James A Robinson, *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty* (Penguin Press, 2019).

Robison, sebagaimana kami tulis dalam buku sebelumnya *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi*,²² kami melihat bahwa akar penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia yang mengarah pada bentuk demokrasi tanpa *demos* adalah terlalu kuatnya oligarki yang dengan cepat melakukan konsolidasi usai Reformasi 1998 dan terutama sejak tahun 2019, di satu sisi, serta tergopoh-gopohnya masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi dan menandingi mereka, di lain sisi. Adalah benar bahwa sesungguhnya perlawanan masyarakat sipil selalu muncul dalam setiap kebijakan bermasalah, mulai dari pelemahan KPK, pembentukan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, namun perlawanan itu terlalu terfragmentasi sehingga mudah dipatahkan.

“Demokrasi Tanpa *Demos*” tentu bukan hal yang diharapkan menjadi akhir dari cerita demokrasi di Indonesia era Reformasi. Karena itu, upaya untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan yang menantang dan menghambat demokrasi perlu dilakukan dengan segera. Secara detail, banyak di antara para penulis di dalam buku ini mengelaborasi tentang solusi-solusi yang patut ditempuh mulai dari memaknai ulang konsep demokrasi Indonesia, merekayasa sistem Pemilu dan partai politik, memperbaiki sederet regulasi hukum dan tata kelola pemerintahan, mereformasi lembaga-lembaga demokrasi, memperkuat kesetaraan gender, dan lainnya. Singkatnya, ada banyak obat yang dapat digunakan untuk menyetatkan demokrasi kita yang dapat disesuaikan dengan gejala-gejala berbeda yang menyertainya. Namun, kami mencatatkan satu hal penting sebagai kunci untuk menghadirkan kembali *demos* secara utuh dalam demokrasi di Indonesia, yakni mengembalikan rakyat dan kepentingan sebagai episentrum demokrasi. Siapapun dan apapun yang dilakukan dalam pengelolaan pemerintahan, demokrasi harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan hal lain. Hal ini terkesan utopis, tetapi itu adalah hal paling nyata yang patut dilakukan saat ini. Menurut kami, langkah nyata yang dapat dilakukan saat ini untuk mewujudkannya adalah membangun sinergi di antara kalangan masyarakat sipil untuk bersama-sama membangun aliansi besar dan solid guna mengimbangi oligarki.

²²Wijayanto, *et. al.*, *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020 dan Outlook 2021* (Depok: LP3ES, 2021).

Seperti halnya setiap praktik yang baik mesti didasarkan pada teori dan refleksi yang matang, kami percaya bahwa penerbitan buku ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk itu.

Kelahiran Satu Generasi Baru

Pada akhirnya, di ujung buku ini, Tim Editor ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah bekerja siang-malam untuk mengawal tulisan dalam buku ini. Kepada Lya Anggraeni yang telah membantu kerja penerjemahan sebagian tulisan. Kepada Gita N. Elsitra yang telah menerjemahkan juga sebagian tulisan dan membantu mencatatkan berbagai proses kerja tim sejak awal hingga selesainya buku ini. Kepada Debhy Mayangsari, Vira Amalia dan Syamsul Rizal yang telah menghubungi dan berkomunikasi dengan para penulis buku ini, maupun narasumber seminar. Kepada Iqbal dan Rizal yang selalu siaga dengan *link zoom* dan mengawal *live streaming* diskusi. Tentunya kepada Malik Ruslan, penyunting bahasa, yang siang dan malam berjibaku dengan setiap naskah yang masuk untuk memastikannya dapat dengan mudah dipahami dan enak dibaca dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih untuk Widjanarko, Wakil Direktur Penerbitan LP3ES dan Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES atas dukungan penuh untuk proyek ini. Akhirnya, terima kasih tak terhingga kepada Prof Didik J. Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES, yang telah terlibat dalam inisiasi dan mengawal penerbitan buku. Tak henti-hentinya meyakinkan kami bahwa hal yang awalnya terasa musykil ini dapat diwujudkan: mengumpulkan lebih dari 100 ilmuwan untuk menulis dalam buku ini dan/atau memaparkan kajiannya dalam rangkaian seminar untuk kemudian terbit dalam tempo sembilan bulan!

Meskipun demikian, kerja keras itu tak akan berarti tanpa dukungan semua kontributor yang berbicara dalam *webinar* maupun para penulis buku ini dengan semua tulisan dari setiap masing-masingnya. Kepada mereka kami telah berjanji bahwa apa pun yang terjadi, buku itu harus sudah terbit pada 19 Agustus 2021, atau tepat di hari ulang tahun ke-50 lembaga ini. Demi memenuhi janji itulah semua kerja keras kami kerahkan. Untuk itu, terima kasih yang terdalam kami haturkan kepada para penulis yang telah mempercayakan tulisan mereka kepada kami. Adalah

sebuah kehormatan bagi kami untuk membaca dan mengkurasi setiap tulisan yang masuk. Kami menyadari tidak mudah untuk merampungkan tulisan di tengah kabar duka cita yang mengepung kita dari kawan dan sahabat, atau bahkan karena ia menimpa keluarga kita sendiri. Maka, apresiasi yang tak terhingga kami haturkan kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya tepat waktu pada awal Maret. Namun kami mengerti sepenuhnya untuk para penulis yang membutuhkan waktu lebih lama karena pandemi: musibah yang menimpa keluarga atau bahkan penulisnya yang mesti mengalaminya. Termasuk, kami sepenuhnya mengerti manakala ada sebagian sahabat yang pada akhirnya memutuskan tidak mengirimkan tulisan karena alasan kesehatan. Apresiasi kami tak sedikitpun berkurang. Tak hanya karena pandemi dan masalah kesehatan adalah faktor yang berada di luar kendali kita semua. Namun juga karena kehadiran mereka dengan pikiran bernas mereka tetap sangat membantu pematangan argumen dan ide buku ini. Yang mau kami sampaikan adalah bahwa suasana kebatinan yang sama sesungguhnya dihadapi oleh para editor buku ini. Kami mencoba mendamaikan kebutuhan untuk terbit tepat waktu di satu sisi dan waktu yang amat terbatas di sisi yang lain. Kendatipun banyak waktu telah kita habiskan dalam rapat di sela-sela perkabungan: sore hari, kebanyakan di malam hari, tak jarang di akhir pekan, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyuntingan kami. Untuk itu permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dalam penyuntingan buku ini.

Akhirnya, jika penulisan buku ini adalah misi yang mustahil, maka para penulis buku inilah yang memungkinkan kemustahilan itu menjadi kenyataan! Kami percaya bahwa para penulis itu hadir dengan satu niat tulus dan sederhana: memberikan kontribusi bagi kemajuan demokrasi di Indonesia! Dan barangkali, seperti halnya kami, mereka juga percaya bahwa satu generasi baru Indonesia yang dapat menjawab tuntutan zaman sudah saatnya untuk dilahirkan. Satu siklus 20 tahunan yang dimulai dari kelahiran Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, pergerakan mahasiswa tahun 1965, Reformasi 1998, dan siapa tahu: 2021! Satu generasi yang lebih bercorak kosmopolitan, yang berisi orang-orang Indonesia

ataupun bukan, yang berbagi nasib menyaksikan pandemi yang belum tentu 100 tahun sekali terjadi, yang benaknya prihatin memikirkan kemunduran Indonesia dan bersama-sama melakukan refleksi dalam buku ini! Semoga niat itu sampai ke langit lalu kembali turun ke bumi menjadi butiran-butiran air hujan yang menjadi satu penanda: *generasi baru akan segera lahir!*

LP3ES, 25 Juli 2021

BAGIAN 4
KORUPSI DAN
PENANGGULANGANNYA

Koreksi Total Kinerja Demokrasi dan Antikorupsi

*Ahmad Khoirul Umam**

Evaluasi kinerja demokrasi dan tata kelola pemerintahan global di tahun 2020 telah dirilis oleh sejumlah lembaga kredibel pada awal tahun 2021 ini. Secara general, pandemi Covid-19 terbukti telah menjadi pengubah permainan (*game changer*), yang berpengaruh signifikan (*major blow*) terhadap kualitas kerja pembangunan demokrasi dan juga antikorupsi selama satu tahun terakhir.

Dalam konteks Indonesia, penilaian terhadap kinerja demokrasi dan antikorupsi juga mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 3 Februari 2021, skor indeks demokrasi Indonesia menurun dari 6,48 (2019) menjadi 6,3 (2020). Dari lima indikator dasar demokrasi yang digunakan, nilai proses Pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi dan kinerja pemerintah (7,5) dan partisipasi politik (6,11), tergolong baik. Namun, dua indikator lainnya, yaitu budaya politik (4,38) dan kebebasan sipil (5,59), nilainya rendah dan tidak mampu mengangkat agregat indeks. Akibatnya, skor indeks demokrasi Indonesia kali ini termasuk angka terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Dari empat

*A. Khoirul Umam adalah Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Jakarta. Umam meraih gelar Ph.D dari School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia (2017). Fokus penelitiannya meliputi kajian *Public Integrity & Anti-Corruption Studies, Democratization in Southeast Asia, Islam in International Politics, and Australia & Pacific Studies*. Saat ini, menjabat sebagai Managing Director of Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Bisa dihubungi melalui E-mail: ahmad.khoirul@paramadina.ac.id.

kategori demokrasi yang dirumuskan EIU, Indonesia masuk dalam kategori “demokrasi cacat” (*flawed democracies*). Ironisnya, indeks demokrasi Indonesia sendiri berada di bawah Malaysia, Filipina, dan bahkan Timor Leste.

Sebelumnya, Transparency International (TI) juga telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 yang juga memberikan “rapor merah” bagi kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. IPK tahun 2020 Indonesia telah mengalami penurunan tajam sebesar 3 poin, dari semula 40 (2019) menjadi 37 (2020), pada skala 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang terkategori sangat bersih. Penurunan IPK ini menjadi yang pertama sejak tahun 2008. Bahkan, IPK sebesar 37 ini juga menandai Indonesia telah mundur jauh lima tahun ke belakang, di mana pada tahun 2016 IPK Indonesia juga berada di angka yang sama (37). Akibatnya, Indonesia yang semula di peringkat 85, kini terjun bebas ke posisi 102, dari 180 negara yang disurvei.

Dua “rapor merah” dari EIU dan TI di atas harus benar-benar menjadi bahan koreksi sekaligus evaluasi atas kinerja pembangunan demokrasi dan antikorupsi di Tanah Air. Sebab, sejak awal pandemi, TI telah mengingatkan masyarakat global bahwa pandemi Covid-19 berpotensi memfasilitasi menguatnya fenomena “neo-otoritarianisme” di sejumlah negara.

Pandemi telah memaksa negara merelaksasikan sejumlah aturan pemerintahan mengingat pentingnya kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan nyawa dan kondisi sosial-ekonomi yang terdampak oleh pandemi. Ironisnya, relaksasi aturan di masa pandemi itu memberikan peluang bagi terjadinya sentralisasi kekuasaan yang mudah dibajak oleh kekuatan politik (*politically hijacked*) dalam suatu negara. Akibatnya, perilaku kediktatoran dan otoritarianisme yang mengancam demokrasi justru mendapatkan panggung di tengah pandemik (TI, 2020).

Indikator dari menguatnya otoritarianisme itu umumnya ditandai oleh semakin melemahnya kebebasan sipil dan terkikisnya kebebasan berekspresi. Kelompok-kelompok yang kritis dan berseberangan secara politik dengan Pemerintah dihadapkan sikap represi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Represi secara langsung itu bisa menggunakan instrumen penegak hukum melalui cara-

cara kriminalisasi, baik penersangkaan dan penuntutan, maupun pengetatan aturan untuk membatasi ruang gerak rival politik. Bahkan, “operasi senyap” untuk menjalankan strategi pecah-belah guna menciptakan faksionalisme dan perpecahan di internal kekuatan lawan, juga sering terjadi.

Sementara itu, langkah-langkah represi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui operasi serangan digital yang melemahkan psikologi dan kepercayaan diri lawan melalui *bully*, *doxing*, hingga teror pribadi maupun kelompok yang dilakukan oleh pasukan *buzzer* yang bergerak di ruang digital. Pergerakan tim *buzzer* ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena tim seperti ini seringkali bergerak sangat cepat, massif, dan sistematis, hingga mampu membuat lawan politik tergetar hingga berpikir ulang untuk melanjutkan sikap kritis dan pergerakan politiknya.

Hal itu mengindikasikan bahwa ada tim solid yang didukung oleh peralatan teknologi canggih dengan *back up* logistik dan sumber daya (*resources*) besar di balik operasi tim-tim *buzzer* ini. Mencermati kuatnya kapasitas dan luasnya jaringan mereka, besar kemungkinan operasi semacam ini dikendalikan oleh mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Alhasil, ketika kritisisme masyarakat politik dikebiri, dikriminalisasi dan diteror, hal itu berpengaruh besar terhadap melemahnya kapasitas pengawasan publik terhadap jalannya tata kelola pemerintahan. Ketika pengawasan publik melemah, celah-celah korupsi berskala besar semakin terbuka lebar. Dalam konteks ini, kita bisa memahami bagaimana kualitas kinerja pembangunan demokrasi memiliki korelasi yang sangat dekat dengan agenda antikorupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan.¹ Karena pada hakikatnya, korupsi merupakan konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkontrol. Maka, melemahnya pengawasan publik bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kekuatan politik untuk melakukan sentralisasi kekuasaan hingga menggerus fondasi demokrasi secara fatal. Untuk itu, koreksi atas kondisi ini harus benar-benar menjadi

¹S. Rose-Ackerman, *Corruption and Government, Causes, Consequence and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Adam Graycar & Tim Prenzler, *Understanding and Preventing Corruption* (New York: Pargrave Macmillan, 2013).

perhatian Pemerintah dan juga masyarakat untuk mengawal kerja-kerja penguatan demokrasi dan agenda antikorupsi di Tanah Air.

Pertama, presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan harus menunjukkan komitmennya secara tegas untuk menghentikan praktik-praktik pengebirian kebebasan sipil. Lembaga penegak hukum, termasuk lembaga pengawas dan pengatur, bukanlah alat politik untuk melayani kepentingan kekuasaan. Untuk itu, instrumen penegak hukum harus benar-benar diarahkan pada kinerja penegakan hukum yang netral, independen, adil dan imparisial.

Kedua, terkait dengan agenda penguatan budaya politik, maraknya praktik eksploitasi politik identitas dan juga politik uang (*money politics*) di tengah masyarakat, menjadi penting untuk diperhatikan. Politik identitas dan politik uang tidak hanya menciptakan polarisasi yang begitu dalam di tengah masyarakat, tetapi juga mengkhianati tujuan proses demokrasi yang sesungguhnya, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good governance*).² Dengan demikian, proses politik bisa diorientasikan pada kerja-kerja pelayanan publik yang efektif (*public delivery service*) dan menghadirkan solusi bagi permasalahan publik. Untuk itu, dibutuhkan komitmen seluruh *stakeholders* politik, baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen, untuk menetralsir budaya-budaya politik yang tidak produktif tersebut.

Ketiga, *grand design* pemberantasan dan pencegahan korupsi harus benar-benar ditempatkan sebagai prioritas bagi kinerja pemerintahan ke depan. Jangan lagi kerja-kerja pemberantasan korupsi justru dianggap sebagai agenda yang menciptakan instabilitas politik yang tidak produktif bagi upaya pembangunan ekonomi. Presiden Jokowi harus memahami bahwa agenda penguatan demokrasi dan pembangunan ekonomi akan rapuh jika menegasikan kerja-kerja pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dalam konteks ini, penguatan KPK masih tetap menjadi prioritas utama. Semoga Presiden Jokowi memahami koreksi dan juga menjalankan evaluasi, untuk kebaikan legasi yang akan ia tinggalkan nanti.

²Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Jakarta: LP3ES & LabSosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, 2019); World Bank, *Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate* (Washington DC: World Bank, 2000).

Dilema Penanganan Politik Identitas dan Pelemahan Demokrasi

Tantangan lain demokrasi Indonesia saat ini adalah persoalan politik identitas. Pasca Pilpres tahun 2014, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan Pilpres tahun 2019, demokrasi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar berupa eksploitasi politik identitas yang menciptakan polarisasi akut di tengah masyarakat. Eksploitasi politik identitas ini berakar pada dipeliharanya sentimen agama dan nasionalisme hingga membuat atmosfer politik nasional menjadi beku dan kian mengeras. Di sini, terjadi apa yang disebut soliditas kekuatan "konservatisme Islam" di satu sisi, dan "hyper-nationalisme" di sisi lain.³

Dalam pertarungan politik tahun 2019, konfrontasi antardua kekuatan ekstrem politik identitas itu seolah meniadakan ruang moderasi (*wasathiyah*) atau "jalan tengah" (*middle way*) yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan berpikir. Keberpihakan terhadap salah satu pihak seolah wajib, dan berdiri di tengah seolah merupakan kesalahan. Akibatnya, dinamika demokrasi tidak menyisakan ruang dialogis yang memadai. Sebaliknya, justru ketegangan, kebencian, dan sikap saling curiga kian menguat di tengah masyarakat. Realitas politik seperti itu merupakan peringatan keras bagi kian memudarnya fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Menghadapi hal itu, pemerintahan Presiden Jokowi tidak berusaha menciptakan ruang dialogis untuk memecah kebuntuan komunikasi antara kelompok ekstrem kanan dan kiri dalam ruang demokrasi nasional. Sebaliknya, Pemerintah yang disimbolkan sebagai representasi kekuatan nasionalis justru lebih memiliki langkah-langkah represif dalam menghadapi kelompok-kelompok Islam konservatif tersebut. Alhasil, bukannya menurunkan ketegangan, langkah kebijakan itu justru berpotensi semakin menumpuk kebencian dan kecurigaan antarkelompok. Adapun stabilitas politik yang dihasilkan pasca langkah represi itu akan cenderung bersifat semu dan laten, serta akan kembali bangkit pada momentum politik lain di masa mendatang.

³Vedi R. Hadiz & Inaya Rakhmani, *Marketing Morality in Indonesia's Democracy* (Melbourne: Asian Studies Association of Australia [ASAA], 2019).

Pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 lalu, Pemerintah kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri sebagai landasan aturan pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI), sekaligus larangan bagi setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Langkah Pemerintah ini belakangan memunculkan kontroversi, karena di satu sisi dituding sebagai langkah represi yang semakin memberangus kebebasan sipil, namun di sisi lain dianggap perlu untuk menralisir kian berkembangnya kekuatan sosial-keagamaan yang dianggap menggerogoti fondasi persatuan bangsa.

Meskipun juga lahir dari akar tradisi Islam *Ahlusunnah waljamaah*, sepak terjang FPI justru dianggap merepresentasikan watak kekuatan intoleran dan konservatif. Bahkan dalam perkembangannya, keberadaan FPI yang seringkali menggunakan pendekatan kekerasan dan propaganda yang kuat, sering bertabrakan dengan elemen Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang selama ini dianggap sebagai dua kekuatan “Islam Nusantara yang Berkemajuan” di Indonesia.

Bahkan, pada momentum Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang sarat dengan eksploitasi politik identitas dan menciptakan polarisasi politik serta pembelahan sosial yang amat dalam, FPI tampil sebagai salah satu aktor utama di dalamnya. Kekuatan itu seolah terus dipelihara oleh kelompok kepentingan politik tertentu untuk menyambut Pemilu 2019, sehingga FPI yang menjadi representasi kekuatan Islam yang berseberangan dengan mereka yang berada di lingkaran pemerintahan, mampu terus memperkuat otot politiknya dan mengembangkan akarnya hingga ke luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan lainnya.

Menakar Efektivitas

Yang selanjutnya menjadi pertanyaan publik adalah, seberapa efektif langkah pelarangan FPI oleh Pemerintah ini? Mampukah FPI benar-benar hilang dari ingar-bingar politik dan demokrasi? Pada saat yang sama, sebagian masyarakat sipil yang sebenarnya kurang setuju dengan pola gerakan FPI, juga khawatir dengan pilihan-pilihan sikap represif Pemerintah yang memunculkan beragam spekulasi tentang nasib dan masa depan demokrasi dan kebebasan sipil di Tanah Air.

Pertanyaan di atas layak diajukan mengingat beberapa hal. *Pertama*, FPI hanyalah organisasi yang memang bisa dimatikan perizinan kelembagaan dan aktivitasnya. Namun, FPI juga telah bertransformasi menjadi identitas sosial yang memuat nilai, sentimen sosial, sekaligus ide gerakan yang tetap hidup (*the living values*) di segmen masyarakat pengikutnya. Sehingga tidak mengagetkan ketika dua hari pasca pembubaran FPI, muncul pendeklarasian organisasi baru dengan nama sedikit berbeda, namun tetap menggunakan akronim yang sama, yakni FPI.

Kedua, jika memang organisasi “FPI-reborn” itu juga akan tetap dibubarkan, maka elemen-elemen penggerak FPI akan cenderung berubah menjadi sporadis. Untuk mengecoh aturan, mereka bisa membuat nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun di sisi lain, mereka akan tetap mudah digerakkan dengan basis isu, narasi, sentimen keagamaan, provokasi, hingga propaganda yang begitu mudah membangkitkan kolektivitas gerakan mereka.

Ketiga, nalar gerakan FPI dan organisasi sejenisnya akan terus hidup seiring dengan terjaganya peredaran narasi kebencian terhadap kelompok lain, kecurigaan terhadap setiap respons negara, kekecewaan terhadap Pemerintah akibat terjaganya masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, hingga ter-*maintain*-nya ujaran kebencian dan *hoax* terkait kebangkitan komunisme, sentimen anti-China, dan lainnya.

Karena itu, dalam menyikapi FPI atau organisasi semacamnya, hendaknya tidak semata-mata dilandaskan pada pola pendekatan struktural. Tetapi juga membutuhkan pola pendekatan dan penyikapan non-struktural, yang membutuhkan komitmen serius dari berbagai elemen bangsa, baik elemen politik, aktor negara, maupun kekuatan non-negara (*non-state actor*).

Ambivalensi Penyikapan

Jika kita cermati lebih mendalam, kemunculan FPI merupakan produk dari dinamika politik. Ditulis dengan jelas oleh Robert W. Hefner dalam artikel berjudul *Muslim Democrats and Islamist*

*Violence in Post-Soeharto Indonesia*⁴ bahwa kelahiran FPI tidak lepas dari nama-nama besar mantan elite militer yang mencoba memanfaatkan kekuatan Islam konservatif di masyarakat urban Jakarta, untuk kebutuhan politik dan dinamika pengamanan pasca Reformasi.

Belum lekang dari memori kita, bagaimana FPI melakukan mobilisasi ribuan massa yang disebut Pam Swakarsa untuk melindungi DPR dan Pemerintah dari tekanan kelompok demonstran yang menolak transisi dari Soeharto kepada Habibie. Setelah kepentingannya terpenuhi, para elite itu segera mencuci tangan dan tidak mengantisipasi dengan cermat bagaimana efek sampingnya terhadap fondasi keumatan dan kebangsaan di Tanah Air.

Selanjutnya, FPI memanfaatkan ruang demokrasi dan menguatnya gerakan Islamisasi pasca Reformasi untuk terus berkembang. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kualitas demokrasi Indonesia bahkan sempat mendapatkan predikat “Free” oleh Freedom House (2010-2011), yang mengindikasikan bahwa hak-hak politik dan kebebasan sipil dijamin kala itu. Sehingga, bisa dipahami jika negara tidak memilih langkah represif dalam menyikapi “kenakalan-kenakalan” FPI kala itu. Dengan kata lain, tuduhan dari para Indonesianist lainnya Marcus Mietzner dan Edward Aspinall,⁵ Greg Fealy,⁶ dan Kikue Hamayotsu,⁷ yang saat itu juga diadopsi oleh sebagian masyarakat sipil bahwa terjadi “pembiaran” FPI di era pemerintahan SBY, menjadi kurang tepat dan tidak relevan. Hal itu dibuktikan oleh penangkapan dan pemenjaraan Rizieq Syihab pada Juni 2008 ketika elemen FPI dengan mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) membuat onar melakukan pemukulan dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila di Monas, Jakarta.

⁴Robert. W. Hefner, *Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2005).

⁵Marcus Mietzner & Edward Aspinall, *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010).

⁶Greg Fealy & Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

⁷Kikue Hamayotsu, “Beyond Faith and Identity: Mobilizing Islamic youth in a democratic Indonesia” *The Pacific Review*. Vol.24(2), 2011.

Namun seiring berjalannya waktu, khususnya pasca 2014, FPI telah mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik. Meminjam analisis Teori Oligarki yang dikembangkan oleh Richard Robison dan Vedi Hadiz⁸ serta Jeffrey A. Winters⁹ bahwa kebangkitan kekuatan sosial-politik seringkali tidak lepas dari kolaborasi dengan kekuatan modal yang menjadi penopang sebuah gerakan. Dalam konteks ini, gerakan Islam populis yang diperagakan oleh FPI utamanya sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2016, tidak lepas dari sokongan kekuatan-kekuatan politik dan pemodal yang berada di balik dinamika kekuasaan.

Transformasi gerakan FPI tidak lepas dari dukungan logistik dan dukungan politik dari elite-elite kekuasaan dan pemodal yang memanfaatkan “jasa gerakan” yang dijalankan oleh mesin politik bernama FPI. Dengan ruang *exposure* yang besar, dukungan logistik yang kuat, dan keberadaan gelar Habib atau trah keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan tertingginya, membuat FPI begitu mudah memperkuat basis pengaruh sosialnya, khususnya di tengah masyarakat Islam perkotaan.

Hal itu didukung oleh kuatnya semangat (*ghirah*) masyarakat muslim Indonesia kontemporer dalam ber-Islam, yang sayangnya tidak diimbangi dengan kapasitas keilmuan dan semangat belajar yang memadai terkait khazanah *Fiqh*, *Usul Fiqh*, *Ulumul Quran*, *Tafsir Hadiz* dan kajian keislaman dasar lainnya. Sehingga, proses pembelajaran keislaman yang dijalani cenderung instan, dangkal dan meminimalkan proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Sebaliknya, proses pembelajaran itu justru mengoptimalkan terdistribusinya narasi, provokasi, dan propaganda keagamaan yang juga mencampuradukkan *hoax*, *fake news* serta ujaran kebencian (*hate speech*). Alhasil, majelis-majelis keagamaan bukannya memperkuat basis persatuan bangsa, melainkan justru menciptakan polusi dalam ruang keumatan kita yang semakin pengap.

Konsistensi Penyikapan

Jika era pemerintahan SBY relatif tidak memiliki pola relasi konfliktual dengan kekuatan Islam, kini era pemerintahan Presiden

⁸Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia*. New York: Routledge Curzon.

⁹Jeffery A. Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Jokowi hampir tidak pernah luput dari serangan kelompok Islam. Belakangan ini, FPI terbukti berhasil melakukan mobilisasi massa hingga mampu menciptakan instabilitas politik dan mengancam legitimasi kekuasaan, sehingga wajar jika pemerintahan Jokowi bersikap lebih tegas pada FPI.

Uniknya, jika pemerintahan begitu tegas terhadap FPI, namun di sisi lain, pemegang kekuasaan justru lebih bersifat akomodatif terhadap elemen politik yang selama ini menikmati dukungan kuat dari massa pengikut FPI. Dengan kata lain, mereka yang menikmati eksploitasi politik identitas dan konsolidasi kekuatan Islam konservatif yang dimotori oleh FPI justru disambut dengan tangan terbuka untuk ikut duduk di kekuasaan. Sehingga wajar jika sempat muncul keretakan koalisi di awal periode kedua pemerintahan Jokowi, yang ditandai protes Partai Nasdem dan PKB, meskipun akhirnya mudah diredam ketika PDIP justru bersikap sebaliknya.

Untuk itu, ke depan, efektif atau tidaknya langkah pembubaran dan pelarangan FPI ini tergantung pada beberapa faktor mendasar. *Pertama*, konsistensi penyikapan dari seluruh *stakeholders* kekuasaan dan aktor politik di Tanah Air. Jika memang merasa kekuatan konservatisme agama mulai mengancam akar persatuan bangsa, maka seluruh kekuatan politik harus konsisten untuk menjauhi dan tidak ikut-ikutan mengeksploitasi kekuatan ini untuk kepentingan sesaat. Mementingkan kepentingan politik sempit dengan menggadaikan fondasi kebangsaan adalah sikap “negarawan gadungan” yang amat menjijikkan. Untuk itu, rakyat harus semakin cerdas mencermati setiap perilaku elite politik yang didukungnya.

Kedua, pembubaran dan pelarangan organisasi hanya akan membuat elemen umat dan pengikutinya menjadi sporadis. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil berbasis keislaman (*Islamic-based civil society*) benar-benar dibutuhkan untuk menetralkan dinamika pemikiran dan pola gerakan mereka. Karena itu, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, termasuk *Robhitoh Alawiyah*, atau organisasi yang menjadi payung tempat bernaung seluruh jaringan para Habaib di Indonesia, benar-benar dibutuhkan untuk meredam dinamika sosial di akar rumput. NU dan Muhammadiyah sebagai jangkar kekuatan Islam di Indonesia harus mampu mengayomi, bukan terjebak dalam ruang interaksi yang konfrontatif. Di sisi lain,

Robhitoh Alawiyah juga diharapkan mampu mengkonsolidasikan dan meredam ketegangan yang muncul di kalangan jaringan para Habib di Tanah Air. Sehingga umat bisa lebih mudah dikendalikan. Kolaborasi kekuatan antara NU, Muhammadiyah, dan *Robhitoh Alawiyah* akan menjadi instrumen yang efektif untuk mengembalikan perjuangan umat kepada karakter Islam *Ahlu Sunnah Waljamaah* yang toleran, moderat dan berorientasi pada kemaslahatan dan pendidikan umat yang cerdas dan berpengetahuan luas.

Ketiga, Pemerintah harus tetap menjaga ruang kebebasan sipil secara adil dan tidak memihak. Islam mengajarkan, “kebencianmu terhadap suatu kaum, jangan sampai membuatmu bersikap tidak adil”. Komitmen itu harus diwujudkan melalui langkah kebijakan negara yang transparan dan akuntabel, terutama dalam menjaga ruang *cyber* dan media sosial dari pengembangbiakan narasi kanan-konservatif, intoleransi, termasuk juga *hoax*, *fake news* dan *hate speech* yang semakin mempertajam polarisasi dan eksploitasi politik identitas di Tanah Air. Jika langkah-langkah itu dilakukan, gerakan konservatisme dan intoleransi akan dapat ditekan secara efektif. Namun jika langkah Pemerintah ambigu dan memihak, maka pola gerakan “mati satu tumbuh seribu” akan kembali hadir dan mengancam masa depan demokrasi di Tanah Air.

Bibliografi

- Fealy, Greg & Sally White. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Graycar, Adam & Tim Prenzler. 2013. *Understanding and Preventing Corruption*. New York: Pargrave Macmillan.
- Hadiz, Vedi R. & Inaya Rakhmani. 2019. *Marketing Morality in Indonesia's Democracy*. Melbourne: Asian Studies Association of Australia (ASAA).
- Hadiz, Vedi R. 2019. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES & LabSosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia.
- Hamayotsu, Kikue. 2011 “Beyond Faith and Identity: Mobilizing Islamic youth in a democratic Indonesia”. *The Pacific Review*. Vol.24(2).

- Hefner, Robert. W. 2005. *Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Mietzner, Marcus & Edward Aspinall. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia*. New York: Routledge Curzon.
- Rose-Ackerman, S. 1999. *Corruption and Government, Causes, Consequence and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press
- Winters, Jeffery A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- World Bank. 2000a. *Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington DC: World Bank.